

POPULATION AND EMPLOYMENT

(Terjadinya pengangguran di masyarakat desa)

A. Population And Employment

Desa bukanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan kompleksitas perencanaan wilayah. Desa hanyalah suatu unit kecil dalam perdesaan. Namun unit kecil inilah yang menyusun Indonesia menjadi sebuah negara yang begitu luas dan besar. Dan memang tak bisa dipungkiri, desa yang kita miliki lebih banyak ketimbang kota. Atas dasar inilah desa menjadi suatu yang tak bisa dikesampingkan dalam perencanaan dan pengembangan regional bahkan nasional.

Banyak hal yang dapat dijadikan acuan untuk mendefinisikan perdesaan. Karakteristik perdesaan seringkali dibedakan dari populasinya. Berbagai macam karakteristik yang digunakan untuk mendefinisikan perdesaan dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap perdesaan itu sendiri, bagaimana memperlakukannya, dan bagaimana merencanakannya. Mendefinisikan perdesaan merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi tindak perencanaan selanjutnya yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat perdesaan itu sendiri.

Padahal desa atau perdesaan merupakan bagian penting dari perencanaan. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan, namun ironisnya hal ini berbanding lurus dengan kondisi kemiskinannya, diaman kantong-kantong kemiskinan juga berada di perdesaan. Masyarakat perdesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sangat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Mereka seperti terampas dari tanahnya sendiri, tidak bisa mengembangkan potensi daerahnya dan berhamburan menyerbu kota-kota besar yang semakin menimbulkan masalah di kedua belah pihak baik itu di perkotaan maupun di perdesaan yang ditinggalkan.

Desa semakin terlupakan dan tidak lagi identik dengan romantisme keindahan alam dan kemeriahan aktivitas pertaniannya. Desa seolah dianggap tidak penting dan membebani. Akan tetapi konsep seperti ini adalah konsep yang salah yang semakin membuat jurang ketimpangan antara desa dan kota menganga lebar. Ketahanan suatu bangsa sebaiknya dibangun dari daerah-daerah. Negara perlu memberikan perhatian kepada daerah agar sanggup mengembangkan potensinya dan akhirnya dapat mandiri tanpa bantuan terus-menerus. Konsep pembangunan saat ini, yang seakan bertumpu pada satu kaki yaitu di Jakarta sesungguhnya amat berbahaya. Kondisi seperti itu sangat rentan dan akan memicu masalah pembangunan yang semakin kronis.

Pada hakekatnya pembangunan pedesaan adalah suatu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan. Pembangunan pedesaan merupakan proses pengembangan kemandirian. Pengembangan kemandirian akan dapat meningkatkan pendapatan. Dan peningkatan pendapatan akan dapat menciptakan kesejahteraan keluarga dalam upaya menghindari masyarakat pedesaan dari himpitan kemiskinan akan terentaskan. Pembangunan pedesaan pada umumnya digunakan untuk menunjukkan tindakan yang diambil dan inisiatif untuk meningkatkan taraf hidup di lingkungan non-urban, pedesaan, dan desa-desa terpencil. Kegiatan pertanian mungkin akan menonjol dalam hal ini, sedangkan kegiatan ekonomi akan berhubungan dengan sektor primer, produksi makanan dan bahan baku.

Tantangan dalam pembangunan pedesaan berkaitan dengan kondisi eksternal, seperti perkembangan internasional yang berhubungan dengan liberalisasi arus investasi dan perdagangan global. Arus globalisasi yang semakin kuat perlu diimbangi dengan kesadaran bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian untuk perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah pedesaan. Sedangkan tantangan internal, yaitu yang berkaitan dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri. Tantangan internal disini dapat meliputi transformasi struktur ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan pangan, masalah ketersediaan

lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan, masalah iptek, SDM, lingkungan dan masih banyak lagi.

Memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi haruslah menjadi paradigma baru dalam program pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Perubahan kondisi internal dan eksternal yang terjadi menuntut kebijakan yang tepat dan matang dari para pembuat kebijakan dalam upaya mengembangkan potensi wilayah pedesaan. Sudah saatnya menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan menjadikan daerah ini sebagai motor utama penggerak roda perekonomian melalui sektor pertanian.

B. Sebab Terjadinya Pengangguran

Ibarat sebuah lingkaran mata rantai. Kemiskinan juga sebuah mata rantai masalah yang saling mengikat dan berpengaruh satu sama lain, sehingga tidak mudah mencari cara untuk mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, penyebab masalah kemiskinan ini bukan hanya rumit tetapi kompleks dan dipengaruhi banyak faktor.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain:

- a. rendahnya pendidikan
- b. kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja
- c. kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja
- d. lapangan kerja yang sempit, memicu faktor pengangguran dan berujung pada kemiskinan.

Di tingkat yang lebih luas, kemiskinan yang bersifat massal terjadi akibat kibat pembangunan kurang berorientasi pada potensi sumber daya alam di pedesaan. Yang paling memprihatinkan lagi, terjadinya kemiskinan akibat keserakahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk yang terakhir ini, penyebab kemiskinan terkait dengan factor kepemimpinan. Dengan asumsi, factor

kepemimpinan yang buruk dapat melahirkan perbuatan tindak pidana korupsi, yang berujung pada lahirnya kemiskinan baru.

Sungguh spektakuler, manakala melihat catatan kemiskinan di negeri ini. Dalam catatan bebarapa peneliti dan para ahli kependudukan menunjukkan, kemiskinan di Indonesia ini sudah mencapai angka 100 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia yang saat ini hampir mencapai 250 juta jiwa. Mereka hidup dibawah garis kemiskinan, kurang sandang, pangan dan papan. Angka yang lebih moderat, Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional dalam catatannya menyebutkan, jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai 45 juta jiwa tersebar ke seluruh negeri ini. Sementara itu, di Propinsi Jawa Barat, BPS setempat telah mencatat. penduduk miskin di wilayah ini pada posisi Maret 2008 sudah mencapai 5.322 juta jiwa. Pada posisi Maret tahun 2009, jumlah kemiskinan di wilayah ini dikatannya turun menjadi 4.983 juta jiwa. Dari jumlah ini, 2.452 juta jiwa penduduk miskin berada di pedesaan dan 2.531 juta jiwa berada di perkotaan.

Angka yang cukup fantastis adalah jumlah penduduk miskin yang tersebar di pedesaan Jawa Barat ini ternyata hampir setara dengan jumlah penduduk di Kota Bandung, yang saat ini angkanya sudah mendekati 3 juta jiwa. Dapat dibayangkan, manakala penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan di Jawa Barat digabung menjadi satu maka jumlah penduduk miskin di Jawa Barat ini akan melebihi jumlah penduduk Kota Bandung, dan sekitarnya

Ditinjau dari sudut permasalahan lambatnya perkembangan perekonomian negara kita, juga akibat dari perilaku buruk oknum birokrat dan jajarannya yang telah ikut andil memperparah kondisi ini. Sisi lain media menginformasikan berapa banyak barang-barang impor yang masuk secara ilegal berhasil diamankan namun tak sedikit pula barang ilegal tersebut masuk ke pasaran Indonesia. Tentu ini akibat dari ketidak seriusan oknum birokrat dalam mengatasi birokrasi yang legal didalamnya.

Intinya krisis yang semakin parah ini terjadi bukan hanya karena ulah para importir nakal, akan tetapi juga oknum birokrat didalamnya telah ikut ambil

bagian dari akibat terjadinya krisis multi dimensi yang tentunya tidak akan bisa selesai sepanjang moral para oknum korup tersebut tidak berubah.

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain;

1. perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif
2. peraturan yang menghambat investasi
3. hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

- **Urbanisasi kemiskinan**

Seperti juga di kota-kota lain. Ada sejumlah factor yang memicu ledakan kemiskinan di kota , menyusul terjadinya urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Dalam beberapa kasus, urbanisasi penduduk dari desa ke kota dipicu pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan , pendidikan, perdagangan dan lainnya di perkotaan jauh lebih baik dan lebih cepat ketimbang di pedesaan. Faktor lainnya, kota bukan hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi memiliki daya tarik bagi penduduk desa karena kota sebagai pusat perekonomian dan perdagangan, pendidikan, informasi dan teknologi.

Ketimpangan pembangunan inilah yang menyebabkan jumlah kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi ketimbang di pedesaan. Dalam kasus tertentu, daya tarik kota yang begitu kuat telah memicu urbanisasi penduduk pedesaan ke perkotaan. Dengan kekuatannya itu, kota bagi penduduk desa seringkali menjadi ajang untuk mengadu nasib.

Kondisi yang buruk ini diperparah lagi oleh lemahnya modal usaha (di sector informal) dan keterampilan penduduk desa. Akibatnya, mereka dalam arena adu nasibnya tidak seluruhnya mampu bersaing dengan tenaga kerja lulusan terdidik di perkotaan. Dalam posisi tertentu, mereka akan kembali ke desa menjadi masyarakat miskin atau menetap di kota menjadi orang miskin, akibat ludesnya modal usaha dan hilangnya pekerjaan mereka.

Gambaran ini menunjukkan, disatu sisi urbanisasi penduduk dari desa ke kota memicu kemiskinan baru di perkotaan. Disisi lain, lambatnya pertumbuhan usaha dan lapangan kerja di perkotaan dapat melahirkan pengangguran, yang berujung pada kemiskinan.

Terkait dengan turunya angka kemiskinan di Jawa Barat pada Maret 2009 itu, BPS Jabar juga mengakui, penurunnya dipengaruhi faktor Bantuan Langsung Tunas (BLT) dan bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Karena itu, daya beli masyarakat menjadi naik. Faktor lainnya, penurunan angka kemiskinan di wilayah ini dipengaruhi oleh penambahan orang bekerja di sektor informal, yang jumlahnya mencapai 650.000 jiwa.

Namun satu hal, ketiga factor di atas, yang menjadi penyebab turunya angka kemiskinan di Jawa Barat ini sesungguhnya hanya bersifat temporal. Dengan kata lain, pada saat tertentu, posisi mereka akan kembali menjadi penduduk miskin. Salah satu indikatornya, tidak selamanya pemerintah mengucurkan BLT dan Raskin. Demikian pula, penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sifatnya hanya sekedar bertahan hidup, musiman atau tidak mampu bertahan lama.

Dalam pengertian ini, sektor informal yang dimaksudkan itu, di antaranya terkait dengan berbagai pekerjaan kuli bangunan, tukang becak, pedagang asongan dan kaki lima serta usaha kecil lainnya.

- **Ekonomi Pedesaan**

Dalam tataran konsep dan pemikiran yang sederhana, pendidikan berbasis pada ekonomi pedesaan dapat mengentaskan kemiskinan. Salah satu hipotesa ini diambil sekedar untuk memutuskan mata rantai masalah kemiskinan yang demikian kompleks dan rumit yang terjadi selama terjadi di negeri ini, tidak terkecuali di Jawa Barat.

Gagasan ini muncul, dengan asumsi sistem pendidikan nasional selama ini belum sepenuhnya berkiblat pada pemberdayaan potensi ekonomi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, yang sangat berlimpah ruah di pedesaan. Karena itu, sistem pendidikan SD, SLTP dan SLTA yang berbasis pada pendidikan umum lebih berkembang pesat, ketimbang pendidikan kejuruan.

Kondisi yang lebih buruk lagi, pendidikan praktis melalui berbagai balai latihan kerja atau sejenis pendidikan kursus berbasis pada potensi ekonomi pedesaan sangat langka dibangun di pedesaan. Padahal, 60 persen lebih penduduk Jawa Barat tinggal di wilayah pedesaan dan kurang dari 40 persen masyarakat tinggal di perkotaan.

Sebagai sebuah gambaran saja, sistem pendidikan nasional yang berbasis pada kurikulum pendidikan umum memaksa siswa SD, SLTP dan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan sekolah yang lebih tinggi. Namun sebaliknya, kurikulum pendidikan kejuruan yang berbasis pada potensi ekonomi pedesaan akan menumbuhkan mental wira usaha bagi masyarakat pedesaan.

Lemahnya orientasi kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan inilah yang menyebabkan langkanya sekolah kejuruan dan pendidikan kursus yang berkiblat pada potensi pedesaan. Lemahnya kondisi ini juga akan menunjukkan, belum maksimalnya kegiatan usaha perekonomian dan perdagangan di pedesaan.

Itu sebabnya, pengolahan lahan lahan pertanian, perkebunan, kehutanan peternakan dan perikanan dari hulu ke hilir di pedesaan hingga sekarang belum mengarah pada mekanisasi. Kondisi yang tidak menguntungkan lainnya, tata niaga dalam sistem perdagangan di bidang usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan masih dikuasai para pemodal kuat atau para tengkulak. Dampak yang sangat serius adalah tenaga kerja di pedesaan didominasi kalangan orang tua rata-rata berusia lebih dari 40 tahun ke atas dan berusia muda sangat minim bekerja di berbagai sektor usaha pedesaan.

Sempitnya lapangan usaha di pedesaan pada akhirnya menciptakan pengangguran dan berujung pada masalah kemiskinan. Dan masyarakat pedesaan saat ini berada di persimpangan jalan, antara menentang di desa tetap menjadi orang miskin atau mengadu nasib ke perkotaan.

Pembangunan sekolah kejuruan di pedesaan memang benar baru prasyarat pertama. Untuk itu, syarat lain yang diperlukan melalui dukungan dan pilihan teknologi tepat guna, yang berbasis pada potensi sumber daya ekonomi pedesaan. Alternatif penggunaan teknologi ini diperlukan terkait dengan pilihan industri makanan, minuman, dan kemudahan fasilitas kredit usaha kecil menengah dibangun dan berkembang di pedesaan.

Pada saat itulah, proses penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan penduduk desa akan berjalan dengan sendirinya. Itu terjadi, manakala pendidikan kejuruan ditopang dengan tersedianya fasilitas industri, kemudahan usaha perdagangan dan perbankan yang berpihak pada masyarakat pedesaan .. Dengan demikian, bergerakinya ekonomi dan perdagangan di pedesaan bukan hanya mampu mengerem urbanisasi penduduk dari desa ke kota tetapi juga dapat mengerem migrasi penduduk miskin pedesaan ke perkotaan. Untuk itu, perlu ada kesaamaan konsep, pemikiran, kemauan dan tanggung jawab bersama di antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi pedesaan

C. Penanggulangan Pengangguran

Masalah ketenagakerjaan di desa sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Pembangunan penanggulangan pengangguran di desa kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.

Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

Strategi lain yang dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mereformasi pelatihan kerja. Reformasi pelatihan kerja ini bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global. Untuk maksud tersebut, maka pemerintah daerah akan melaksanakan upaya-upaya strategis untuk menanggulangi pengangguran, diantaranya adalah:

1. Pengembangan Informasi Pasar Kerja [labor market information]. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung perencanaan tenaga kerja yang tepat. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan sangat tergantung dari

ketersediaan informasi yang cepat dan valid. Untuk mengetahui implementasi keberhasilan program penanggulangan pengangguran baik yang di kota maupun di desa perlu disusun sistem informasi untuk memonitor keadaan pasar kerja yang tersedia.

2. Reformasi Pelatihan Kerja [training reforms]. Reformasi pelatihan bertujuan untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih terampil, berpendidikan lebih tinggi dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar hasil kerja atau produksi dapat bersaing dipasar global. Reformasi pelatihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas iklim kerja yang lebih baik [quality of working life] dari tenaga kerja yang bersangkutan. Reformasi pelatihan lebih diarahkan kepada kebutuhan pasar dan dilaksanakan secara terpadu.
3. Pengembangan dan bimbingan usaha secara mandiri. Strategi ini merupakan upaya untuk mengurangi pengangguran terdidik baik di kota maupun di pedesaan melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha kecil dengan fasilitasi dari pemerintah. Kelompok-kelompok usaha ini perlu dibimbing dan difalilitasi baik dari segi ketrampilan berwirausaha, pendanaan, manajemen usaha, sampai dengan pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya kelompok usaha mandiri yang sudah dapat berdiri sendiri dan mapan, dapat secara bergantian dan berantai memfasilitasi kelompok usaha baru lainnya, maka upaya ini akan dapat menyerap banyak tenaga kerja baru.
4. Pengembangan usaha informal keluarga. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendorong para pencari kerja terdidik untuk melanjutkan usaha informal dilingkungan keluarganya. Dengan memberi bekal tambahan latihan ketrampilan berwirausaha, mereka akan dapat mengembangkan, memodernisasi dan menjalankan usaha informal keluarganya dengan baik. Pengembangan usaha informal keluarga diarahkan untuk dapat memanfaatkan potensi daerah setempat dan diarahkan untuk mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih banyak. Dengan demikian mereka tidak memasuki pasar kerja, tetapi justru

mereka akan dapat menciptakan dan memperluas kesempatan kerja baik bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun orang-orang lain disekitarnya.

5. Penempatan tenaga kerja secara langsung di pasar kerja. Strategi penempatan bagi para pencari kerja atau pengangguran dilaksanakan melalui sistem informasi pasar kerja dan bursa tenaga kerja terpadu. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, maka setiap kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja akan dapat terdeteksi secara cepat dan tepat. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas SDM para pencari kerja, mereka perlu dibekali dengan pelatihan kerja atau pemagangan dengan cara on-the job training maupun off-the job training. Para pencari kerja yang telah mendapat bekal tersebut dapat dipastikan akan lebih kompetitif di dalam perebutan bursa tenaga kerja, sehingga mereka akan lebih mudah ditempatkan karena mereka telah siap memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Di samping itu, pengembangan sistem informasi pasar kerja yang baik memungkinkan para pencari kerja dapat meningkatkan mobilitasnya dalam rangka mengisi setiap lowongan kerja yang tersedia.
6. Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada, karena terbatasnya lapangan kerja di dalam negeri. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri lebih diprioritaskan bagi tenaga kerja profesional, mempunyai kualifikasi ketrampilan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan tugas yang ada di luar negeri. Dengan demikian, tidak diperkenankan melakukan kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara membabi buta, tanpa memperhatikan kualifikasi calon tenaga kerja yang bersangkutan.
7. Pengembangan usaha agro-bisnis di pedesaan. Upaya ini juga ditujukan untuk mengurangi pengangguran yang diarahkan untuk masyarakat pedesaan. Terbatasnya lahan pertanian di pedesaan dan jenis pekerjaan sektor pertanian yang hanya bersifat musiman, merupakan kontribusi tersebar penyebab munculnya setengah pengangguran di pedesaan. Dengan demikian, diperlukan kegiatan atau usaha yang tidak dipengaruhi oleh luas lahan pertanian maupun musim. Pengembangan usaha agrobisnis ini dapat bersifat skala kecil maupun

menengah. Meskipun lahan pertanian jumlahnya terbatas dan jenis pekerjaan di sektor pertanian sifatnya musiman, tetapi perluasan kesempatan kerja pada sektor ini masih sangat dibutuhkan. Namun demikian, upaya yang dilakukan hendaknya lebih mengarah pada peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja, sehingga akan dapat meningkatkan output pertanian. Di samping itu, di pedesaan juga banyak terdapat tenaga kerja yang berpendidikan relatif rendah, maka pengembangan usaha ini dapat diarahkan bagi penyerapan tenaga kerja yang kurang terdidik tersebut. Dengan pengembangan usaha agrobisnis di pedesaan, akan muncul unit-unit ekonomi yang mampu berdiri sendiri dan menjadi kekuatan perekonomian masyarakat pedesaan sehingga mereka tidak lagi mencari pekerjaan di perkotaan.

Population And Employment

Paper

diajukan untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah Geografi Desa Kota

Disusun oleh;

- Lita Sari (0800982)
- Dede Rosi (0800984)
- Nurhikmah (0800985)
- Awanda Nurvita (0800986)
- Rizky Lestari (0800988)



**JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2009